



Tunggakan Pajak Ranmor Rp 920 Miliar

■ 739.743 Kendaraan Tak Bayar Pajak di Kalbar
 ■ Bapenda Ancam Upaya Paksa



Dengan jumlah tersebut potensi pajak dari PKB berjumlah Rp 1.482.469.665.762 atau Rp 1,48 triliun lebih pada 2019 lalu

Mahmudah
 Kepala Bapenda Kalbar

PONTIANAK, TRIBUN - Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalbar bernilai fantastis, mencapai Rp 950 miliar lebih. Ada 686.069 unit sepeda motor dan 53.674 unit kendaraan roda empat ke atas yang PKB-nya belum dibayarkan si pemilik.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar Mahmuda menjelaskan, Pemprov Kalbar berdasarkan aturan mempunyai lima objek pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan



Bermotor (PBB KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Penyumbang terbesar sejauh ini untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kalbar datang dari PKB. Berdasarkan data Babenpa Kalbar jumlah kendaraan aktif di Kalbar 2015-2019 berjumlah 1.654.923 unit. "Dengan jumlah ter-

■ Bersambung ke hal. 7



Tunggakan Pajak Ranmor Rp 920 Miliar

Sambungan Hal.1

sebut potensi pajak dari PKB berjumlah Rp 1.482.469.665.762 atau Rp 1,48 triliun lebih pada 2019 lalu. Namun Bapenda Kalbar hanya bisa menarik Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 520.714.474.011 atau Rp 520 miliar," ungkap Kepala Bapenda Kalbar Mahmudah kepada *Tribun*, Senin (24/2).

Mahmudah menerangkan, dengan jumlah tersebut, penarikan PKB yang terealisasi hanya 37,90 persen dari jumlah potensi Rp 1,48 triliun. Jika ditotal, tunggakan PKB mencapai Rp 920.619.426.442 atau Rp 920 miliar lebih.

"Tunggakan PKB mencapai Rp 920 miliar dan kendaraan roda empat lebih banyak nominalnya. Sedangkan unitnya memang sedikit dari roda dua," ucap Mahmudah.

Jika dirinci, kendaraan roda dua yang menunggak pajak 686.069 unit dan roda empat ke atas berjumlah 53.674 unit. Nomialnya tunggakan roda dua 41,46 persen dan roda empat ke atas 58,54 persen dari total tunggakan Rp 920 miliar lebih.

"Tentunya tunggakan ini kita klasifikasikan, ada tunggakan pribadi (plat hitam), plat kuning milik perusahaan angkutan dan ada plat merah milik pemerintahan," ucap Mahmudah.

Tunggakan pajak kendaraan plat hitam mencapai Rp 874 miliar, plat kuning Rp 24 miliar dan plat merah Rp 20 miliar.

Khusus untuk kendaraan mewah di Kalbar, Mahmudah memastikan jumlah tunggakan tidak terlalu signifikan. Ber-

dasarkan data yang ada, kendaraan mewah hanya tercatat 91 unit dengan nominal Rp 882.533.900 atau Rp 882 juta.

Mahmudah menjelaskan berdasarkan identifikasi pihaknya ada beberapa penyebab tunggakan begitu besar, bahkan nominalnya hampir dua kali lipat dari realisasi yang ada. "Pertama, wajib pajak melakukan wanprestasi atas kredit kendaraan bermotornya, sehingga ditarik leasing. Kedua, kendaraan telah dijual dan yang bersangkutan tidak melapor ke Samsat. Ketiga, kendaraan mengalami rusak berat," jelasnya.

Keempat, lanjutnya, kendaraan masuk dalam jaminan, sehingga belum bisa dilakukan balik nama. Kelima, tempat pembayaran pajak jauh dari jangkauan.

"Keenam, wajib pajak lupa jatuh tempo pembayaran. Ketujuh, wajib pajak tidak mempunyai uang kerena mendahulukan kebutuhan primer. Kedelapan, kendaraan yang bersangkutan hilang namun tidak melapor ke Samsat," paparnya.

Untuk meningkatkan penarikan PKB, Mahmudah menjelaskan, pihaknya sudah merumuskan beberapa strategi. Pertama, melakukan razia kendaraan bermotor bersama instansi terkait dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota.

"Kedua, melakukan tagihan langsung bagi orang atau badan usaha yang memiliki kendaraan. Ketiga, mendekatkan pelayanan pajak melalui Samsat, Gerai Samsat, Samsat Keliling, Samsat Corner, Drive Thru, Samsat

Home Service dan e-Samsat," jelasnya.

Keempat, kata Mahmudah, mengingatkan wajib pajak melalui short message service (SMS). Kelima, pihaknya akan menublikasikan penunggak pajak melalui media cetak atau elektronik.

"Keenam, mengeluarkan kebijakan inovatif berupa angsuran pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor minimal dua tahun masa berlaku pajak," jelasnya.

Mahmudah menegaskan, pihaknya terus melakukan terobosan dan inovasi untuk memaksimalkan potensi pajak, bahkan memaksimalkan dari kendaraan yang ada diperkebunan.

"Pembayaran pajak ini sifatnya memaksa, kita bisa saja melakukan tindakan dengan memanggil atau menarik objek pajak yang tidak dibayar pajaknya," ucap Mahmudah.

Ia meminta seluruh masyarakat, badan usaha dan instansi pemerintah aktif membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan untuk pembangunan daerah setempat.

Ragam Alasan

Ada berbagai alasan yang disampaikan para pemilik kendaraan yang tak membayar pajak. Rusmadi (42), sudah tujuh tahun menunggak pembayaran pajak sepeda motornya. Menurutnya, motor miliknya sudah butut sehingga ia enggan membayar pajak. "Motornya udah ndak layak dibawa jalan, cuma untuk dipakai masuk kebun saja," ungkap Rusmadi.

Rusmadi menuturkan, PKB yang wajib dibawarkannya setiap tahun mencapai Rp

219.000. Ia menganggap angka tersebut lumayan berat karena penghasilan tidak tetap.

Alasan lain diungkapkan Anna (23). Mahasiswi perguruan tinggi di Pontianak ini telat membayar pajak lantaran salah pahaman dengan saudara laki-lakinya. Ia berpikir saudaranya yang membayar pajak, namun setelah dikonfirmasi ternyata pajak kendaraanya belum dibayarkan.

Saat bertemu *Tribun*, Anna mengaku sedang menunggu masa pemutihan untuk membayar tunggakan pajak kendaraannya. "Denda pajaknya udah numpuk tu, jadi rencananya tunggu ada pemutihanlah untuk bayar pajak kendaraannya," pungkasnya.

Tribun juga menemui sejumlah warga yang taat membayar pajak di Kantor Bersama Samsat Pontianak Wilayah 1, Jl Adisucipto Pontianak. Mahhud, satu di antara warga tengah mengantre proses pembayaran pajak.

Ia membayar pajak sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Mahhud mengeluarkan uang Rp 241.000 setiap tahunnya. Menurutnya, pembayaran pajak lebih mudah dilakukan di bank, namun karena ia harus mengganti pelat motor, jadi terpaksa harus ke Samsat.

Proses cepat juga menjadi alasan Agung (23) membayar pajak di Samsat. Ia menyeter Rp 235.000 untuk pajak sepedamotornya. "Alasan membayar pajak, karena memang sudah kewajiban dan demi mendukung infrastruktur daerah juga," katanya. (oni/mg1/mg2)

